

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sarana transportasi yang dianggap memiliki biaya relatif terjangkau yaitu angkutan umum. Jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, angkutan umum memiliki biaya yang lebih rendah. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Angkutan umum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang tahun 2007, Kabupaten Sumedang memiliki 46 trayek angkutan pedesaan dimana hanya 13 trayek yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Adapun 33 trayek yang sudah tidak beroperasi disebabkan karena rendahnya permintaan di rute-rute trayek tersebut yang menyebabkan ada beberapa wilayah yang tidak terlayani angkutan umum. Sedangkan kondisi angkutan pedesaan yang masih beroperasi saat ini sepi penumpang dikarenakan kinerja pelayanan yang menurun.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa masalah pelayanan angkutan umum yaitu rendahnya tingkat kinerja pelayanan angkutan pedesaan, ini dapat dilihat dari parameter kinerja pelayanan angkutan seperti terdapat trayek yang sudah tidak beroperasi, dan tingkat kenyamanan jasa angkutan umum yang rendah sehingga menjadikan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang menjadi tidak optimal. Frekuensi kendaraan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang yang rendah dengan rata-rata hanya 9 kendaraan/jam, Headway rata-rata 36,28 menit, rata-rata waktu sirkulasi 101 menit, dengan kondisi angkutan yang sudah tua dengan umur rata-rata kendaraan yang sudah di atas 15 tahun dimana semakin tua umur kendaraan maka tingkat kenyamanan akan semakin rendah menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan pedesaan dan adanya ketidakseimbangan jumlah armada yang beroperasi menyebabkan rendahnya faktor muat angkutan

pedesaan di Kabupaten Sumedang dengan faktor muat rata-rata hanya 19% yang menunjukkan rata-rata hanya 8 penumpang yang terangkut per hari per armada. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang sehingga diperlukan rasionalisasi kebutuhan jumlah armada sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan angkutan pedesaan.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, maka judul yang diambil untuk penyusunan Kertas Kerja Wajib adalah "**Rasionalisasi Jumlah Armada Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Sumedang**". Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini akan di bahas mengenai analisis kinerja pelayanan angkutan pedesaan agar armada yang beroperasi menjadi optimal, sehingga keinginan pengguna jasa angkutan umum juga menjadi terpenuhi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan-permasalahan dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Tidak seimbangnya jumlah armada yang beroperasi dimana sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang tahun 2007 ada 1.330 armada yang diberi izin beroperasi, sedangkan armada yang beroperasi di lapangan hanya 623 armada. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya permintaan angkutan pedesaan yang dapat dilihat dari faktor muat yang rendah dengan rata-rata hanya 19%.
2. Rendahnya tingkat kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang seperti faktor muat yang rendah dengan faktor muat rata-rata hanya 19% yang menunjukkan rata-rata hanya 8 penumpang yang terangkut per armada per harinya, frekuensi kendaraan angkutan pedesaan di Sumedang yang rendah dengan rata-rata hanya 9 kendaraan/jam, dengan *Headway* rata-rata 36,28 menit, rata-rata waktu sirkulasi 101 menit, serta umur kendaraan yang sudah tua dengan umur rata-rata kendaraan di atas 15 tahun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dapat dirumuskan masalah angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana kebutuhan jumlah armada beroperasi sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana perbandingan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang sebelum dan sesudah dilakukan Rasionalisasi jumlah armada?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang dan bagaimana upaya peningkatan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang sehingga nantinya dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan judul Kertas Kerja Wajib ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang.
2. Menganalisis jumlah armada yang beroperasi sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang.
3. Membandingkan kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang sebelum dan sesudah dilakukan Rasionalisasi jumlah armada.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini untuk membatasi ruang lingkup kajian yaitu pada kinerja pelayanan angkutan

pedesaan di Kabupaten Sumedang yang digunakan untuk memudahkan dalam perolehan data serta mengolah dan menganalisis data. Adapun batasan masalah dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini antara lain:

1. Kinerja pelayanan angkutan pedesaan sesuai parameter penilaian kinerja yang meliputi tingkat operasi kendaraan, umur kendaraan, jumlah penumpang terangkut, *Load Factor*, Frekuensi, *Headway*, dan Waktu Sirkulasi.
2. Rasionalisasi jumlah armada yang disesuaikan dengan parameter penilaian kinerja sebagai upaya peningkatan dan rekomendasi sistem operasi pada kinerja pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Sumedang.
3. Perbandingan kinerja pelayanan sebelum dan sesudah dilakukan Rasionalisasi jumlah kebutuhan armada.